

## DAMPAK PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH TERKAIT PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM ASPEK GEOGRAFI, SOSIAL POLITIK, DAN EKONOMI

Sriyono<sup>1</sup>, Aprilia Rahmayani<sup>2</sup> & Zahrotul Wahidah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Correspondence Author: sriyono@umsida.ac.id

### *ABSTRACT*

This research comes from a phenomenon that has been hot in the news recently. It has been announced that the capital city of Indonesia will be moved to the East Kalimantan region. Before the capital city is moved, the government needs to consider the area that will be called the new national capital later. These considerations include the geographical, socio-political and economic aspects of the Kalimantan region which will have an impact on the development of Indonesia. The main reason for moving the country's capital was to improve the Indonesian economy. Therefore, this research was prepared to explain how the government makes decisions regarding the relocation of the country's capital by considering aspects such as geography, socio-political and economic aspects as well as the impacts of these decisions. This research uses a literature review methodology. Based on research from several literatures, it can be concluded that the government's decision regarding moving the country's capital by looking at geographical, socio-political and economic aspects will have a good impact on the country, especially on the economy.

**Keyword:** *Decision Making, National Capital, Moving the National Capital, Geographical Aspects, Socio-Political Aspects, Economic Aspects*

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang diuntungkan dengan letak geografisnya yang strategis. Dikatakan strategis karena terdapat diantara 2 benua dan 2 samudra serta terdapat 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan juga Selat Malaka yang dapat ditempuh oleh berberapa jenis kapal laut. NKRI disebut negara kepulauan karena didalamnya terdapat pulau sebanyak 17.504 dengan luas wilayah yang menduduki urutan ke-14 negara terbesar di dunia yang terpampang seluas 3.997 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan luas daratan 1.922.570 km<sup>2</sup> dan luas perairan mencapai 3.257.483 km<sup>2</sup>. Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu mencapai 81.000 km, 14 kali panjang garis pantai dunia. Sedangkan luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau mencakup hampir 70% total wilayah Indonesia. Berdasarkan survei, secara keseluruhan geografis dan nama tempat yang dilakukan pada tahun 2010 dan dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah pulau di Indonesia terdaftar sebanyak 13.466 pulau (Supriyatno, 2018).

Luas kota yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk, menyulitkan pemerintah dalam mengatur jumlah penduduk atau pertumbuhan kota. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas, polusi, kriminalitas dan tingginya migrasi dari kota ke pinggiran kota, yang pada akhirnya berujung pada kematian. Pembentukan kota merupakan alternatif pengembangan kota baru (Sahamony et al., 2020). Oleh karena itu, pada tanggal 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo memberitahukan mengenai perpindahan ibu kota negara ke Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Pribadi & Utomo, 2021). Alasan rencana perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur

karena risiko bencana di wilayah Kalimantan Timur sangat kecil dan wilayah tersebut diukur sudah cukup strategis di antara kota-kota yang berkembang, khususnya kota Balikpapan dan Samarinda. Proyek perpindahan ibu kota ini diharapkan dapat membantu mengembangkan beberapa sektor di wilayah Kalimantan Timur bahkan Indonesia (Hasibuan & Aisa, 2020).

Ibu Kota baru terletak secara geografis pada titik tengah negara Indonesia yang dimana hal ini nantinya akan dapat dengan mudah terlaksananya perataan ekonomi sebagai tindak dalam proses pembaruan ekonomi yang tidak merata, di khususkan pada wilayah timur. Persiapan suatu kawasan tentu menjadi hal yang menentukan, karena nantinya kawasan di sekitarnya harus siap untuk dibangun ibu kota negara yang baru. Ini dapat dilihat dari awal pengembangan kawasan ibu kota negara baru hingga pengembangan kawasan industri di Wilayah Kalimantan Timur. (Pribadi & Utomo, 2021).

Kegiatan pemerintah dan dunia usaha yang saat ini berpusat di Pulau Jawa, di khususkan DKI Jakarta, sudah membatasi perkembangan perekonomian baru di luar Jawa (Hasibuan & Aisa, 2020). Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan ketidakseimbangan antar wilayah secara keseluruhan telah mencegah bertumbuhnya ekonomi nasional. Dengan adanya rencana pemindahan IKN, pemerintah berkeinginan untuk dapat memperluas pemerataan ekonomi serta meminimalisir kesenjangan di Pulau Jawa dan juga luar Pulau Jawa (Pribadi & Utomo, 2021). Maka dari itu, tindak lanjut perencanaan awal untuk perpindahan Ibu Kota akan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai kajian pemindahan IKN.

Di sisi lain, pemindahan IKN ke luar Pulau Jawa mempunyai beberapa risiko. Hal ini bersangkutan dengan persiapan di daerah tujuan dalam hal infrastruktur yang diperlukan untuk membantu pengendalian pemerintahan. Pemindahan pusat pemerintahan (ibu kota) sendiri merupakan upaya untuk memindahkan atau menciptakan suatu ruang atau kawasan baru sebagai bagian dari pusat pemerintahan untuk mengalihkan ruang atau kawasan sebelumnya. Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan dari suatu daerah ke daerah lain merupakan suatu keputusan yang penting karena memerlukan persiapan kelembagaan, sosial, dan modal yang tidak sedikit. Dari sisi pembiayaan, meski pemerintah mengatakan APBN akan memenuhi 19,2% dari total kebutuhan anggaran Rp 446 triliun, namun tetap terjadi risiko yang menambah beban APBN jika terjadi kegagalan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta. (Hasibuan & Aisa, 2020).

Dari uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dijadikan pembahasan nantinya yaitu mengenai bagaimana pemerintah mengambil keputusan dan dampaknya terkait pemindahan ibu kota negara dilihat dari aspek geografi, sosial politik, maupun ekonomi. Untuk itu, dalam tulisan ini dibahas mengenai dampak pengambilan keputusan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara dalam aspek geografi, sosial politik, dan ekonomi.

### **Pengambilan Keputusan**

Keputusan merupakan perilaku organisasi yang pada hakikatnya adalah perilaku individu dengan menggambarkan adanya proses pengambilan keputusan yang relatif. Dapat dikatakan bahwa memahami perilaku organisasi lebih penting daripada kepentingan pribadi. Adapun aktivitas manajemen yang penting, salah satunya yaitu memahami suatu sistem pengambilan keputusan yang tepat guna memperbaiki hasil. Oleh karena itu, suatu proses memilih di antara berbagai pilihan, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk sampai pada pilihan terbaik dalam menanggapi suatu masalah atau

menyelesaikan suatu konflik dapat disebut dengan pengambilan keputusan (Sudjiman & Sudjiman, 2018).

### **Ibu Kota Negara**

Ibu kota dapat dikatakan sebagai sentral pemerintahan kota yang dirancang untuk berdirinya suatu negara. Umumnya, ibu kota negara berfungsi sebagai pusat perkantoran dan kawasan untuk berkumpulnya para pemimpin pemerintahan. Untuk pusat pemerintahan, ibu kota pada biasanya berfungsi untuk pusat kekuatan politik dan ekonomi, oleh karena itu mempunyai peran yang penting di kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak negara yang menjadikan kota besar negaranya sebagai ibu kotanya yang mencerminkan keistimewaan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, berbangsa dan bernegara, sampai akhirnya ibu kota mempunyai tugas penting dalam mengenalkan jati diri, karakter, dan jati diri suatu negara. Ibu kota biasa disebut dengan kota yang multifungsi dengan misi diplomatik, pusat administrasi, dan pusat ekonomi yang sangat maju. Identifikasi ini membuat ibu kota menjadi kota tujuan urbanisasi. (Mazda, 2022).

### **Perpindahan Ibu Kota Negara**

Perpindahan ibu kota negara akan membawa kemajuan negara dan bangsa. Hal ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya negara-negara pasca kolonial. Keputusan Indonesia memindahkan ibu kota diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan serta mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, dan juga untuk menciptakan ibu kota baru yang sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia. Lokasi pusat yang diputuskan sebagai ibu kota negara baru secara strategis terletak di dua wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (KuKar) (Mazda, 2022).

### **Aspek Geografi**

Wilayah Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana alam dengan begitu lokasi yang geografis menjadi faktor mendasar yang sangat penting. Dapat dilihat melalui segi geografis, Garis katulistiwa yang berletak di seberang Pulau Kalimantan memang layak direkomendasikan sebagai Ibu Kota Negara. Garis katulistiwa memisahkan Pulau Kalimantan menjadi Kalimantan yang berada di belahan bumi bagian utara dan Kalimantan yang berada di belahan bumi bagian selatan. Selain itu, secara geologis Pulau Kalimantan stabil dan relatif terjaga dari gempa bumi (Vulkanik atau Tektonik). Ini dikarenakan wilayah tersebut tidak berpotongan dengan kerak bumi serta tidak terdapat rangkaian gunung berapi seperti Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Pembenahan Ibu Kota yang dilakukan tanpa merusak lingkungan alam, seperti halnya penyediaan lahan resapan serta hutan kota, memang perlu difokuskan. Sebab, apabila tidak, akan menyebabkan banjir dari Jakarta berpindah ke luar daerah (Nasruddin, 2013).

### **Aspek Sosial Politik**

Perpindahan Ibu Kota ke luar Jawa dan Indonesia Bagian Timur (IBT) akan memindahkan pusat pembangunan nasional jauh dari Pulau Jawa dan Indonesia Bagian Barat (IBB). Hal ini menjadi tahap dan kesempatan bagi pemerataan pembangunan di Indonesia Timur (IBT) guna menghadirkan peluang lebih luas bagi pembangunan daerah di luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota merupakan salah satu strategi untuk meredakan ketegangan dalam proses pembangunan yang semasa ini masih menimbulkan ketidakadilan dan pemerataan distribusi energi. Indonesia benar-benar perlu lebih banyak berkembang di luar Pulau Jawa untuk menetralkan kemampuan gaya sentrifugal di Pulau Jawa yang menjadikan perekonomian tidak efisien dalam jangka panjang serta kualitasnya yang semakin

menurun. Pada masa ini, 80% Industri nasional berada di Pulau Jawa. Sementara itu, bahan baku pembangkit listrik serta pemanas industri sebagian besar diimpor dari luar Pulau Jawa. Pada waktu yang sama, Pulau Jawa memfokuskan diri untuk terus mempersempit lahan persawahan dengan predikatnya sebagai wilayah dengan lahan persawahan subur di Indonesia. Badan Pusat Statistik melaporkan (1 Juli 2010) bahwa lahan pertanian di Pulau Jawa berkurang 27 juta hektar setiap tahunnya. (Nasruddin, 2013).

### **Aspek Ekonomi**

Letak Ibu Kota harus mampu menjadi daya pikat perekonomian yang berkelanjutan, artinya Ibu Kota Negara wajib menciptakan kondisi bagi pembangunan perekonomian. Namun ada beberapa faktor yang berkaitan dengan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian ibu kota karena alasan tertentu. Melihat pengalaman negara lain yang memindahkan Ibu Kota nya, memindahkan Ibu Kota merupakan perpindahan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Sektor ekonomi umumnya mencakup usaha kecil dan menengah (UKM) atau bahkan perusahaan lokal dan investor dalam maupun luar negeri. Jika ibu kota direlokasi, maka dapat lebih mudah dalam memindahkan pusat pemerintahan ke daerah lain. Sebab kawasan ekonomi lebih susah berpindah, dan Jakarta masih diperlukan meskipun hanya menjadi pusat perekonomiannya saja.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel, metode yang digunakan merupakan literature review atau kajian kepustakaan. Literature review adalah sebuah penelusuran serta penelitian kepustakaan menggunakan metode membaca serta mengkaji beberapa jurnal, buku, serta berbagai naskah terbitan yang lain yang juga berhubungan terhadap topik penelitian dalam membuat suatu tulisan yang berhubungan terhadap suatu topik maupun isu khusus. Kajian literatur review melihat literatur ilmiah mengenai suatu topik serta dengan kritis melakukan analisa, evaluasi juga mesintesis adanya dugaan penelitian, teori, dan praktik. Pencarian sumber literatur atau referensi melalui database sciences dari Google Scholar dengan menggunakan katapengambilan keputusan, pemindahan ibu kota, aspek yang mempengaruhi. Jumlah penyaringan artikel yang diperoleh dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan mendapat hasil akhir yang didapatkan yaitu hasil dari 8 artikel yang direview.

### **PEMBAHASAN**

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada pertengahan 2023 telah mencapai 278,69 juta jiwa yang dimana angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya (275,77 juta jiwa). Hal ini berdampak pada kepadatan penduduk yang terjadi pada negara Indonesia khususnya Pulau Jawa. Terjadinya kepadatan penduduk di pulau Jawa dapat mengakibatkan menurunnya tingkat perekonomian negara. Dengan banyaknya penduduk di Indonesia sehingga mengalami kepadatan, dan berkurangnya pemanfaatan sumber daya manusia pada era saat ini mengakibatkan tidak adanya lapangan pekerjaan untuk keberlangsungan hidup manusia. Dari hal tersebut perekonomian tidak bisa terkontrol karena kurangnya lapangan pekerjaan atau bahkan presentase kemiskinan penduduk di Indonesia akan mengalami peningkatan. Selain itu, pemerataan ekonomi di Indonesia juga dapat dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia terlalu fokus pada bagaimana kemajuan di daerah Ibu Kota dengan sedikit mengabaikan daerah luar Jawa.

Pembangunan atau perbaikan daerah di luar pulau Jawa memang sudah banyak, namun kepadatan penduduk di pulau Jawa juga menjadi pusat perhatian.

Mengenai permasalahan yang dihadapi ibu kota Jakarta, (Illmann, 2015) juga memaparkan bahwa adanya beberapa permasalahan terjadi di ibu kota Jakarta seperti datangnya banjir, bencana alam, kemiskinan, pembangunan dan kepadatan penduduk yang berlebihan juga dapat mempengaruhi fungsinya suatu pemerintahan (Purnama & Chotib, 2022). Adanya rencana perpindahan Ibu Kota juga merupakan keputusan yang tepat jika dilihat dari tujuan utamanya yang dimana merupakan sebuah bentuk cara pengembangan berbagai sektor negara Indonesia terutama sektor ekonomi merupakan salah satu bagaimana akan di upayakan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Perpindahan Ibu Kota dengan melihat pada aspek geografi sebagai bahan pertimbangan merupakan suatu hal yang tepat. Dimana dengan kondisi alam dari wilayah Kalimantan Timur yang memungkinkan jika dijadikan sebagai Ibu Kota Negara baru dengan sedikitnya resiko bencana alam dan juga melimpahnya sumber daya alam yang nantinya dapat dimanfaatkan. Disisi lain aspek geografi ini nantinya akan memberikan dampak positif yang dimana banyaknya sumber daya alam akan dimanfaatkan dan berdampak pada perekonomian negara.

Adapun aspek lain yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan pemerintah yaitu pada aspek sosial politik. Aspek ini lebih memperhatikan bagaimana pembangunan daerah yang akan berpengaruh pada pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Dengan kondisi wilayah Kalimantan Timur yang masih belum sepadat wilayah DKI Jakarta, maka peluang pemerataan pembangunan akan dapat dilakukan dengan maksimal. Aspek ini nantinya juga akan berpengaruh pada bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah Ibu Kota Negara dipindahkan. Dari sisi politik, perpindahan Ibu Kota juga sering kali menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan ini berguna untuk memperkuat persatuan bangsa, membangun simbol kebangkitan negara, dan lebih mewakili keberagaman etnis (Purnama & Chotib, 2022).

Aspek ekonomi juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan terkait pemindahan ibu kota negara. Pasalnya dari segi pembiayaan sendiri, Indonesia masih menanggung beban risiko penambahan jika terjadinya kegagalan pada anggaran negara apabila pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta tidak sesuai. Namun, 12,9% dari total kebutuhan anggaran dapat ditanggung oleh APBN. Memang dalam proyek infrastruktur sendiri terdapat risiko jangka panjang, terutama pada proyek yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Di sisi lain, pihak swasta tentu berharap keuntungan dapat terealisasi sesuai perhitungan yang dibuat di awal proyek. Adanya pembagian risiko, pemerintah sangat perlu memperhatikan perjanjian kerja sama dengan perusahaan atau pihak swasta agar kualitas IKN baru dan infrastrukturnya dapat mendukung operasional pemerintahan (Hasibuan & Aisa, 2020).

Ibu Kota Negara harus bisa menjadi magnet perekonomian yang berkelanjutan atau harus memberikan kemudahan dalam pembangunan ekonomi pada suatu negara. Maka dari itu, peningkatan potensi dalam aspek ekonomi melalui pembangunan dan pemindahan IKN dengan adanya transformasi ekonomi Indonesia sentris yang mengarah pada disertifikasi ekonomi serta multiplier effect harus didukung oleh semua pihak agar dapat berfungsi secara efektif. Ciri dan visi dalam menjalankan fungsi kementerian pengelolaan keuangan negara pada tahun 2023 Sejalan dengan optimisme dan kewaspadaan, strategi alokasi keuangan/dana IKN yang diperkirakan mencapai Rp466 triliun harus terus dikaji ulang. (Purnama & Chotib, 2022).

Bukan hal yang mudah untuk memindahkan kegiatan perekonomian secara umum, namun bukan tidak mungkin untuk memindahkan fungsi ibu kota ke kota lain guna meningkatkan kapasitas transportasi kota lama, menciptakan kondisi kehidupan yang nyaman dan menciptakan peluang bagi kota baru dan kota-kota lainnya. Daerah yang berkembang secara ekonomi juga akan berkembang. Mobilitas yang muncul akibat munculnya permasalahan sosial seperti halnya ekologis dan berbagai permasalahan lalu lintas di Kota Jakarta perlu disikapi secara hati-hati. Jangan sampai keinginan menyelesaikan permasalahan ibu kota Jakarta hanya mengalihkan permasalahan ke daerah yang akan menjadi Ibu Kota Negara di kemudian hari. (Purnama & Chotib, 2022). Hasil penerapan sistem pemerintahan terpusat akan berdampak pada Ibu kota Jakarta yang multifungsi. Ini berakibat pada beberapa pengaruh sosial politik, ekonomi, dan ekologi yang timbul dari implementasi sistem pemerintahan dan semacamnya meskipun telah diakui bahwa hal tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap stabilitas politik untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.

Dampak perpindahan ibu kota negara tentunya juga dilihat dari aspek perekonomian negara, karena dalam penelitian adanya dampak positif terhadap perekonomian yang dinyatakan Bappenas untuk langkah IKN dengan perkiraan peningkatan PDB sebesar 0,1%. Bappenas menyebutkan, peningkatan PDRB berasal dari pemanfaatan sumber daya yang potensial seperti pembukaan lahan untuk kebutuhan infrastruktur produksi dan pembukaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia berketerampilan tinggi yang sebelumnya tidak tersedia (Pribadi & Utomo, 2021).

Terkait penguatan jati diri bangsa, bahwa IKN pada hakikatnya merupakan simbol kekuatan dan jati diri suatu bangsa. Langkah pemindahan IKN diyakini akan turut memperkuat jati diri suatu bangsa (Illmann, 2015). Berbeda dengan IKN lama, calon IKN baru seringkali perencanaannya dapat dilakukan dengan lebih baik seperti halnya menciptakan, mengadaptasi atau memperkuat jati diri bangsa. IKN juga dapat digunakan sebagai simbol keberagaman seperti agama, suku atau ideologi, dimaksudkan untuk mempersatukan suatu bangsa dan menjadi kebanggaan bangsa. Contoh negara yang menjadikan perjalanan IKN sebagai alasan untuk memperkuat identitas nasionalnya adalah Nigeria, Jerman, Turki, Pakistan, Kazakhstan, Tanzania, dan Malaysia. (Purnama & Chotib, 2022).

## **PENUTUP**

Berdasarkan dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan terkait pemindahan ibukota negara Indonesia memiliki pertimbangan dari berbagai aspek yaitu aspek ekonomi, geografi, sosial politik dan identitas nasional. Pemindahan ibukota negara ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan identitas bangsa, dan juga diharapkan mampu mengatasi masalah kepadatan penduduk dan permasalahan di ibukota sebelumnya. Bagaimanapun, keberhasilan pemindahan ibukota negara ini tergantung pada implementasinya dan juga pengelolaan risikonya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 183-203.  
<https://doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7947>

- Mazda, C. N. (2022). Analisis Dampak Pindahan Ibu Kota Negara (Ikn) Terhadap Social Security. *Jurnal Enersia Publika*, 6(1), 1-12.
- Nasruddin. (2013). Pindahan Ibukota RI ke Kalimantan (Analisa Geostrategis NKRI). *Ikatan Geograf Indonesia*, 0274, 636-644.
- Pribadi, D. S., & Utomo, S. (2021). Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2, 27-42. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.28>
- Purnama, S. J., & Chotib. (2022). Analisis Kebijakan Publik Pindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 155-168. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2155>
- Sahamony, A. A., Muta'ali, L., & Mei, E. T. W. M. (2020). Tinjauan Geografis Wilayah Potensial Ibukota Negara Indonesia. *Jurnal Teknosains*, 10(1), 86-101. <https://doi.org/10.22146/teknosains.36756>
- Sudjiman, P. E., & Sudjiman, L. S. (2018). Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Proses Pengambilan Keputusan. *Jurnal TeIka*, 8(2), 55-67. <https://jurnal.unai.edu/index.php/teika/article/view/2327>
- Supriyatno, M. (2018). Pertimbangan Pindahan Ibukota Negara Ditinjau Dari Perspektif Geografi Pertahanan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 3(1), 1-24. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v3i1.373>